



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.17,5 kode pos 90243
Email : bdkmsr@gmail.com Tlp. 554875, Fax. 554535

RENCANA KERJA TAHUN 2020



**BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MAKASSAR**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.17,5 Kotak Pos 1397 Tlp. 554875, Fax. 554535

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR
Nomor : SK. 49/BDLHK-6/REN.1/2019

Tentang

RENCANA KERJA
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR
TAHUN 2020

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. bahwa Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi tugas menyelenggarakan diklat aparatur dan Non Aparatur di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dan perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

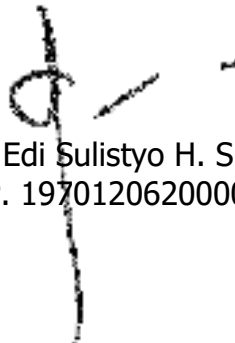
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/ 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
19. Rencana Strategis Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020 - 2024.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun Anggaran 2018, Nomor:DIPA-029.08.2.238073/2018 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR TAHUN 2020;
- Kesatu : Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020, sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Renja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2020 ini disusun untuk dijadikan acuan bagi seluruh aparatur Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar dalam melaksanakan kegiatan tahun 2020;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 1 Juli 2019
Kepalai Balai,



Dr. Edi Sulisty H. Susetyo, S.Hut, M.Si
NIP. 197012062000031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jakarta.
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku selaku Korwil UPT Kementerian LHK Prov. Sulawesi Selatan di Makassar

Lampiran Keputusan Kepala Balai Diklat LHK Makassar
Nomor : SK.49/BDLHK-6/REN.1/2019
Tanggal : 1 Juli 2019

**RENCANA KERJA
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR
TAHUN 2020**

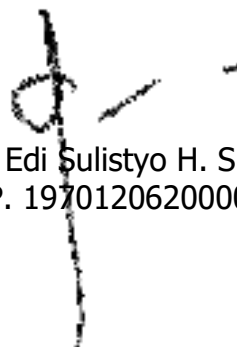
KATA PENGANTAR

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Diklat LHK) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan diklat aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dituntut dapat berkinerja terukur untuk menunjang Reformasi Birokrasi pada BP2SDM.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2020-2024 sekaligus merupakan tindaklanjut kinerja dan capaian target sesuai arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta sebagai instrument kerangka kerja kegiatan penyelenggaraan diklat aparatur LHK pada Balai Diklat LHK Makassar.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memenuhi kinerja sesuai yang diharapkan.

Kepalai Balai,



Dr. Edi Sulisty H. Susetyo, S.Hut, M.Si
NIP. 197012062000031004

DAFTAR ISI

SK. Kepala BDLHK Makassar	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
Kata Pengantar	iv
I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	3
II. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2018 dan Prognosis TA. 2019..	5
B. Capaian Serapan Anggaran TA. 2018 dan Prognosis TA. 2019.....	9
III. Rencana Kerja Tahun 2020	
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program	
Prioritas Nasional.....	11
B. Kegiatan, sasaran kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan	
Tahun 2020	12
IV. Penutup.....	16
V. Lampiran	
1. Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2020	
2. Rencana Diklat Tahun 2020	
3. Rencana Kinerja Tahun 2020	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki periode pembangunan nasional tahun 2020 – 2024, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan tiga pilar pembangunan nasional. Pengelolaan SDA Indonesia menjadi basis dalam menciptakan keunggulan kompetitif struktur perekonomian bangsa yang kokoh dengan dukungan SDM dan kemajuan IPTEK. SDM yang berkualitas merupakan aktor yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan sedangkan IPTEK menentukan keberhasilan dalam pembangunan nasional, ketangguhan ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkembangnya budaya masyarakat.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mengoptimalkan fungsi hutan untuk mencapai manfaat lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari sangat membutuhkan SDM dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai. Dukungan ketersediaan SDM dan kualitas yang memadai menjadi prasyarat mutlak dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan hutan lestari sampai tingkat tapak. Peranan lembaga diklat menjadi penting karena dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lingkungan hidup dan kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.

Pendidikan dan pelatihan SDM lingkungan hidup dan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur dan Non Aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Balai Diklat LHK Makassar melakukan perencanaan kerja untuk menghasilkan penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Perencanaan kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja tahun 2020 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kerja Balai Diklat LHK Makassar merupakan acuan bagi Balai Diklat LHK Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi. Dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Balai Diklat LHK Makassar perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kualitas dan kuantitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan, maka kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas aparatur dan pihak-pihak lain (*stake holder*) yang terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Peningkatan profesionalisme aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan melalui proses diklat lingkungan hidup dan kehutanan untuk dapat memenuhi kebutuhan aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan yang memiliki kemampuan teknis, kepemimpinan, komitmen dan moralitas yang tinggi serta meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kerjasama di dalam melaksanakan pekerjaan atau penyelenggaraan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, disamping guna mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon III di bidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan P2SDM yang merupakan satuan organisasi yang mempunyai kewenangan mengelola kegiatan sesuai tugas dan fungsinya serta harus bertanggung jawab terhadap sasaran kinerja yang harus dicapainya.

2. Tugas Pokok

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17,5 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai

tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non-aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan wilayah pelayanan sebanyak 10 provinsi meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;
7. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Struktur Organisasi dan SDM

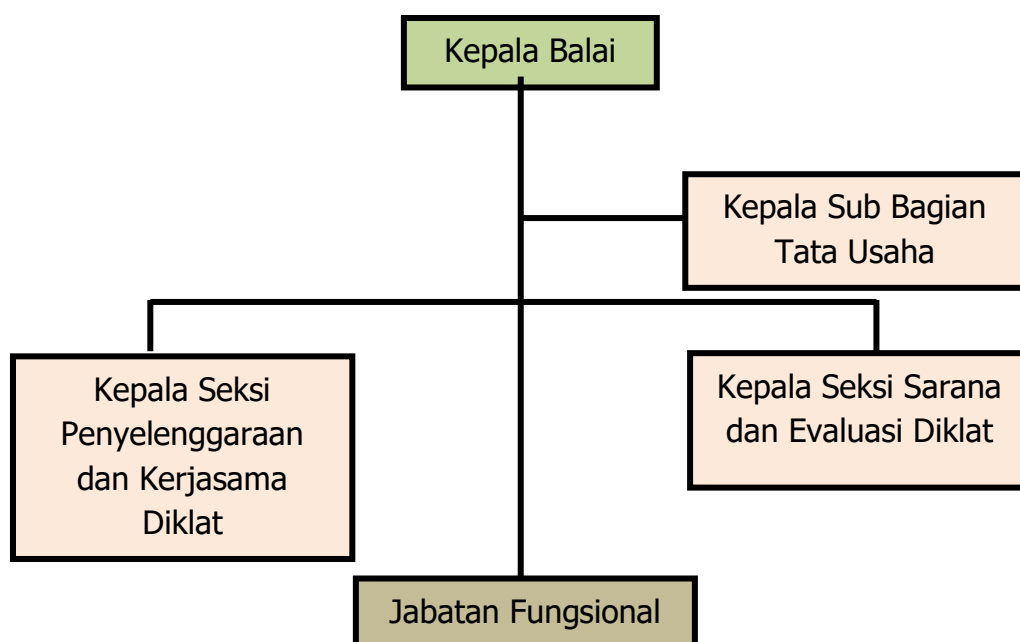
1. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Diklat Kehutanan Makassar memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi barang milik negara dan rumah tangga. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat (IKD), penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan. Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan sarana dan

prasarana pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi pasca diklat (EPD) dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan.



Bagan Struktur Organisasi Balai Diklat LHK Makassar

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sampai dengan Desember tahun 2019 jumlah pegawai di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar sebanyak 88 (delapan puluh delapan) yang terdiri dari 65 laki-laki dan 23 perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan Pegawai pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural	4
2	Fungsional Widyaiswara	19
3	Fungsional Penyuluh Kehutanan	1
4	Fungsional Pengada Barang & Jasa	1
5	Fungsional Umum	38
6	Tenaga Kontrak	20
7	Tenaga Bakti Rimbawan	5
	Jumlah	88

Tabel 2. Keadaan Pegawai pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Doktor/ Ph.D /S-3	7
2	Master / Magister / S-2	15
3	Sarjana / S-1	27
4	Diploma / D-3	1
5	SLTA / SMK	35
6	SLTP	3
7	SD	-
	Jumlah	88

Tabel 3. Keadaan Pegawai pada Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Berdasarkan Golongan

Instansi	Golongan																Jumlah (Orang)	
	IV					III				II				I				
	a	b	c	d	e	a	b	C	d	a	b	c	d	a	b	c		d
BDLHK Makassar	6	7	3	1	-	3	15	5	9	3	4	6	1	-	-	-	-	65

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN PROGNOSIS TAHUN 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Diklat LHK Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Capaian kinerja Balai Diklat LHK Makassar TA 2018 tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar TA 2018

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase (%)
Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur LHK dalam Bidang Diklat Administrasi, Teknis dan Fungsional	390 Orang	390 Orang	100
	Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran diklat	1 Unit	1 Unit	100
	Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran untuk mendukung SMK Kehutanan	1 Unit	1 Unit	100
	Meningkatnya kapasitas tenaga bakti rimbawan	60 Orang	70 Orang	100
	Meningkatnya kapasitas tenaga pendamping KTH	60 Orang	60 Orang	100
	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas generasi muda lingkungan hidup	540 Orang	540 Orang	100

Perincian atas capaian indikator kinerja Balai Diklat LHK Makassar tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur LHK dalam Bidang Diklat Administrasi, Teknis dan Fungsional

Dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur LHK dalam Bidang Diklat Administrasi, Teknis dan Fungsional, terdapat beberapa komponen kegiatan diantaranya adalah :

- a. Diklat Administrasi
- b. Diklat Teknis
- c. Diklat Fungsional
- d. Pendukung Kediklatan

Penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat LHK Makassar TA 2018 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Penyelenggaraan Diklat TA 2018

No	Jenis Diklat	Rencana			Realisasi			Ket
		Jml. Angk	Lama Diklat (Hari)	Jml. Peserta (Orang)	Jml. Angk	Lama Diklat (Hari)	Jml. Peserta (Orang)	
1	SIG Bagi Operator	1	15	30	1	15	30	BDLHK Makassar
2	SIG Berbasis Ponsel	1	6	30	1	6	30	BDLHK Makassar
3	PUHH Kayu Hutan Hak	1	6	30	1	6	30	BDLHK Makassar
4	Pengendalian Jenis Tumbuhan Invasif	1	9	30	1	9	30	BDLHK Makassar
5	Rehabilitasi Hutan Mangrove	1	6	30	1	6	30	BDLHK Makassar
6	Perubahan Iklim dan REDD+ Bagi PEH	1	6	30	1	6	29	BDLHK Makassar
7	Penegakan Hukum Polisi Kehutanan	1	5	30	1	5	30	BDLHK Makassar
8	Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Hutan	1	6	30	1	6	31	BDLHK Makassar
9	Fasilitator HTR	1	6	30	1	6	30	BDLHK Makassar
10	Teknik Menyusun Materi & Media Tercetak	1	8	30	1	8	30	BDLHK Makassar
11	Pembuatan Bokashi	1	5	30	1	5	30	BDLHK Makassar
12	Penulisan Karya Tulis Ilmiah	1	6	30	1	6	30	BDLHK Makassar
13	SIG Berbasis Ponsel	1	6	30	1	6	30	Eks. BLK Manokwari
	Jumlah			390			390	

- 2) Terwujudnya KHDTK sebagai Sarana Pembelajaran Diklat
Komponen kegiatan terwujudnya KHDTK Tabo-Tabo, Kab. Pangkep sebagai sarana pembelajaran diklat meliputi :
- a. Perencanaan
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan
 - c. Pemeliharaan
 - d. Perlindungan, pengamanan dan penyuluhan
 - e. Administrasi dan pelaporan
- 3) Terwujudnya KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan Untuk Mendukung SMK Kehutanan

Sasaran terwujudnya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola sesuai kriteria dan standar pengelolaan hutan adalah sebagai implementasi dari misi meningkatkan pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Tabo-Tabo sebagai sarana kediklatan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu diklat yang di selenggarakan oleh Balai Diklat LHK Makassar. Pada tahun anggaran 2018, KHDTK Tabo-Tabo memperoleh anggaran ***Prioritas Nasional*** untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan vokasi bagi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan berbagai jenis kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK Tahun 2018
2. Pengembangan dan Pemanfaatan
 - a. *Pembangunan teaching factory/unit produksi andalan (Prioritas Nasional)*
 - b. *Perubahan paradigma pengelola KHDTK (Prioritas Nasional)*
3. Pemeliharaan
 - a. Pemeliharaan KHDTK
 - b. Sarana Persuteraan Alam
4. Perlindungan, Pengamanan dan Penyuluhan
5. Administrasi dan Pelaporan Kegiatan KHDTK

4) Meningkatnya Kapasitas Tenaga Bakti Rimbawan

Penyelenggaraan Diklat Bakti Rimbawan dilaksanakan sebanyak 2 angkatan, dengan peserta 60 bertempat di Kampus Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. Dalam pelaksanaannya, jumlah peserta yang mengikuti diklat sebanyak 70 orang, hal ini terjadi dikarenakan adanya tambahan 10 tenaga yang ditetapkan oleh Kepala Badan P2SDM sebagai tenaga Bakti Rimbawan. Rencana dan realisasi Diklat Bakti Rimbawan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rencana dan Realisasi Diklat Tenaga Bakti Rimbawan

No	Nama Diklat	Rencana			Realisasi			KET.
		Jml. Angk	Lama Diklat	Jml. Peserta	Jml. Angk	Lama Diklat	Jml. Peserta	
1	Bakti Rimbawan Angk. I	1	10	30	1	10	35	BDLHK Makassar
2	Bakti Rimbawan Angk. II	1	10	30	1	10	35	BDLHK Makassar
	JUMLAH			60			70*	

*) Terdapat 10 tambahan peserta yang ditetapkan oleh Kepala BP2SDM sebagai tenaga Bakti Rimbawan

5) Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pendamping KTH

Pelaksanaan Diklat Pendampingan KTH dilaksanakan sebanyak 2 angkatan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. Rencana dan realisasi Diklat Pendampingan KTH dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rencana dan Realisasi Diklat Pendampingan KTH

No	Nama Diklat	Rencana			Realisasi			KET.
		Jml. Angk	Lama Diklat	Jml. Peserta	Jml. Angk	Lama Diklat	Jml. Peserta	
1	Pendampingan KTH Angk. I	1	5	30	1	5	30	BDLHK Makassar
2	Pendampingan KTH Angk. II	1	5	30	1	5	30	BDLHK Makassar
	JUMLAH			60			60	

6) Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Pada kegiatan layanan perkantoran ini tidak sepenuhnya terserap maksimal dikarenakan adanya kelebihan alokasi anggaran tunjangan kinerja dan adanya sisa anggaran pada kegiatan langganan daya dan jasa.

Pengukuran capaian kinerja Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2018 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja fisik Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2018 untuk meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten dan profesional untuk mendukung pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 100 %, masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat memuaskan.

Selanjutnya pada tahun 2019, Balai Diklat LHK Makassar menetapkan 2 (dua) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK serta Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Diklat LHK Makassar s/d Juni 2019

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s/d Juli 2019	Prognosis s/d Desember 2019
Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur LHK dalam Bidang Diklat Administrasi, Teknis dan Fungsional	360 Orang	240 Orang	360 Orang
	Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran diklat	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	Meningkatnya kapasitas tenaga pendamping KTH	60 Orang	60 Orang	60 Orang
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas generasi muda lingkungan hidup	120 Orang	120 Orang	120 Orang

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

Pada tahun 2018, pagu anggaran Balai Diklat LHK Makassar mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 353.802.000,- (*tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua ribu rupiah*) yang diperuntukkan untuk pembiayaan kenaikan tunjangan kinerja (tunkin) pegawai dari 60 % menjadi 70 %.

Sehingga pagu anggaran yang semula sebesar Rp. 14.888.973.000,- (*empat belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) berubah menjadi Rp. 15.242.775.000,- (*lima belas milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 12.856.720.602,- (*dua belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus dua rupiah*) dan anggaran PNBPN sebesar Rp.2.342.342.641,- (*dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*).

Adapun serapan anggaran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar Tahun 2018, yakni realisasi keuangan sebesar Rp 15.199.063.243 (99,71%) dan realisasi fisik sebesar 99.96%.

Perincian serapan anggaran TA 2018 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Serapan Anggaran Balai Diklat LHK Makassar TA 2018

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosen (%)
029.08.10	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM			
5441	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK			
5441.001	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur LHK dalam Bidang Diklat Administrasi, Teknis dan Fungsional	2,077,973,000	2,077,482,826	99,98
5441.006	Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran diklat	50,000,000	49,997,275	99,99
5441.003	Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran untuk mendukung SMK Kehutanan	1,350,000,000	1,313,606,248	97,30
5441.004	Meningkatnya kapasitas tenaga bakti rimbawan	252,000,000	251,998,500	100,00
5441.005	Meningkatnya kapasitas tenaga pendamping KTH	274,000,000	273,996,720	100,00
5441.994	Layanan Perkantoran	10,188,802,000	10,181,989,089	99.93

5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup			
5443.002	Meningkatnya kapasitas generasi muda lingkungan hidup	1,050,000,000	1,049,992,585	100,00
	JUMLAH	15,242,775,000	15,199,063,243	99,96

Selanjutnya untuk serapan anggaran tahun berjalan dan prognosis s/d Juni 2019 tersaji pada tabel 10.

Tabel 10. Capaian serapan anggaran satker Balai Diklat LHK Makassar s/d Juni 2019

Kode	Program/Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi s/d Juni 2019 (Rp)	Prognosis s/d Desember 2019 (Rp)
029.08.10	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM			
5441	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK			
5441.001	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur LHK dalam Bidang Diklat Administrasi, Teknis dan Fungsional	2.750.000.000	2.749.018.205	2.749.018.205
5441.003	Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran diklat	387.000.000	386.978.950	386.978.950
5441.005	Meningkatnya kapasitas tenaga pendamping KTH	260.000.000	259.936.224	259.936.224
5441.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	300.000.000	299.907.880	299.907.880
5441.994	Layanan Perkantoran	12.372.118.000	12.335.003.435	12.335.003.435
5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup			
5443.002	Meningkatnya kapasitas generasi muda lingkungan hidup	240.000.000	239.996.869	239.996.869
	JUMLAH	16.309.118.000	16.270.841.563	16.270.841.563

III. RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. Strategi dalam mendukung Program Kementerian LHK dan Program Prioritas Nasional

a. Strategi dalam mendukung Program Kementerian LHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam dokumen Renstra 2020-2024 merumuskan tujuan pembangunan yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian LHK tahun 2020-2024 yang akan diusung, adalah :

- 1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- 2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
- 3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Balai Diklat LHK Makassar sebagai UPT BP2SDM Kementerian LHK yang melaksanakan diklat bagi aparatur maupun non aparatur SDM LHK bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur maupun non aparatur SDM LHK melalui pelatihan bidang LHK dan mampu melaksanakan tugas secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan serta program-program kehutanan yang telah disusun oleh Kementerian LHK.

b. Strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan Visi dan Misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong". Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yang menjadi prioritas terdapat dalam 9 (sembilan) agenda yang disebut Nawa Cita :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia Lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, misi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan tema dan sasaran pembangunan tersebut di atas, pada tahun 2019 pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional yang terdiri dari :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industry, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
4. Pemantapan ketahanan energy pangan dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat LHK Makassar, maka strategi untuk mendukung prioritas tersebut di atas terutama dalam pembangunan manusia adalah dengan menyelenggarakan diklat aparatur dan non aparatur di bidang LHK, mewujudkan KHDTK Tabo-Tabo sebagai sarana pembelajaran diklat, menyelenggarakan pelatihan pendampingan KTH, dan menyelenggarakan pelatihan masyarakat di bidang kehutanan yang kemudian dijabarkan lagi dengan indikator kinerja kegiatan.

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan

Rencana penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat LHK Makassar, adalah untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur sebanyak 390 orang

Sasaran meningkatnya kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat teknis dan fungsional sebanyak 390 orang bertujuan untuk meningkatkan daya saing SDM LHK untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.377.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Indikator pencapaian sasaran di atas meliputi:

1. Terselenggaranya Diklat Teknis dan Fungsional

Untuk mencapai hasil kegiatan dengan indikator sasaran di atas, ditetapkan menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional yang diikuti oleh 390 orang aparatur

sumber daya manusia LHK, yang pelaksanaan diklat dilaksanakan di Makassar.

Diklat ini terdiri dari 13 jenis dan 13 angkatan, yaitu :

JENIS DIKLAT	JML ORANG	LAMA DIKLAT	JUMLAH JPL	JUMLAH ANGK.
1. SIG Berbasis Ponsel	30 orang	6 hari	54 JPL	1 Angk.
2. Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan	30 orang	6 hari	50 JPL	1 Angk.
3. Alih Tingkat Polhut Terampil Ke Polhut Ahli	30 orang	9 hari	70 JPL	1 Angk.
4. Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	30 orang	6 hari	50 JPL	1 Angk.
5. Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat	30 orang	8 hari	66 JPL	1 Angk.
6. PUHH Kayu Hutan Negara	30 orang	8 hari	60 JPL	1 Angk.
7. Penginderaan Jauh	30 orang	5 hari	40 JPL	1 Angk.
8. Penyusunan Rancangan Sumur Resapan	30 orang	6 hari	50 JPL	1 Angk.
9. Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu	30 orang	6 hari	50 JPL	1 Angk.
10. Pengambilan Contoh Uji Air, Udara Emisi dan Ambien	30 orang	5 hari	40 JPL	1 Angk.
11. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Untuk Wisata Alam	30 orang	6 hari	52 JPL	1 Angk.
12. Resolusi Konflik Sumber Daya Alam	30 orang	5 hari	45 JPL	1 Angk.
13. SIG Bagi Analisis	30 orang	15 hari	100 JPL	1 Angk.
JUMLAH	390 orang			13 Angk.

2. Pendukung Kediklatan

Pendukung kediklatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung terlaksananya penyelenggaraan kediklatan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Program dan Anggaran Diklat

Kegiatan perencanaan, program dan anggaran diklat dilaksanakan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat LHK Makassar. Kegiatan ini juga untuk mengembangkan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi rencana dan program serta keterpaduan rencana dan program diklat antara Balai Diklat LHK Makassar dengan unit kerja dan pihak terkait lain baik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD)
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021
- 3) Penyusunan RKA-KL Tahun 2021
- 4) Penyusunan POK Tahun 2020
- 5) Peningkatan Kapasitas Pegawai
- 6) Evaluasi Pasca Diklat (EPD)

b. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Diklat

Kerjasama diklat antar Balai Diklat LHK Makassar dan pengguna diklat (UPT Pusat, Dinas-Dinas, UPT Daerah, Asosiasi dan lain-lain) diperlukan untuk mengakomodir diklat-diklat yang dibutuhkan oleh para pengguna diklat. Kegiatan yang menunjang dalam rangka mengembangkan kerjasama diklat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu dengan melaksanakan koordinasi kerjasama diklat dan melaksanakan konsultasi ke pusat dan ke wilayah pelayanan.

2. Terwujudnya KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan sebanyak 1 unit

Sasaran terwujudnya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola sesuai kriteria dan standar pengelolaan hutan adalah sebagai implementasi dari misi meningkatkan pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Tabo-Tabo sebagai sarana kediklatan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat LHK Makassar. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan berbagai jenis kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek KHDTK Tahun 2021
2. Pengembangan Sarana Diklat
3. Pemeliharaan KHDTK
4. Pemeliharaan Sarana Pesuteraan Alam
5. Pemeliharaan Sarana Persemaian
6. Perlindungan dan Pengamanan KHDTK
7. Penyuluhan
8. Administrasi dan Pelaporan Kegiatan KHDTK
9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

10. Pembayaran Honorarium Tenaga Bakti Rimbawan

11. Pemeliharaan Rumah Produksi Gula Semut

3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 1 Layanan

Kegiatan layanan ini terdiri dari beberapa komponen yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin serta Renovasi Gedung/Bangunan yang sesuai dengan Pengarus Utama Gender (PUG). Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

4. Layanan Perkantoran sebanyak 1 Layanan

Kegiatan layanan perkantoran merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran yang dapat melibatkan baik barang maupun jasa. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 14.980.000.000,- (*empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*). Jenis kegiatan meliputi:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak 63 (enam puluh tiga) orang pegawai baik PNS dan CPNS atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan layanan perkantoran sehari-hari baik di Balai Diklat LHK Makassar. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- 1) Pemeliharaan Gedung Negara di Makassar dan di KHDTK Tabo-Tabo
- 2) Pemeliharaan Kendaraan Operasional
- 3) Operasional Perkantoran dan Pimpinan
- 4) Pembayaran Langganan dan Jasa
- 5) Pemeliharaan Peralatan/Barang Inventaris Kantor
- 6) Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Institusi
- 7) Operasional Kegiatan Informasi dan Komunikasi
- 8) Pemeliharaan Jaringan Kantor

5. Meningkatnya Kapasitas Generasi Muda Lingkungan Hidup Melalui Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan sebanyak 150 Orang

Dalam rangka pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kegiatan pendampingan Kelompok Tani Hutan sangat penting. Untuk mendukung kegiatan Perhutanan Sosial

perlu ditingkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya melalui penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat (Kelompok Tani Hutan). Sasaran kegiatan ini sebanyak 120 orang (4 angkatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 598.000.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan berupa :

JENIS PELATIHAN	JML ORANG	LAMA DIKLAT	JUMLAH JPL	JUMLAH ANGK.
1. Budidaya Tanaman Porang	30 orang	3 hari	22 JPL	1 Angk.
2. Budidaya dan Pengolahan Aren	30 orang	3 hari	22 JPL	1 Angk.
3. Budidaya Lebah Madu	30 orang	3 hari	22 JPL	1 Angk.
4. Teknik Agroforestry	30 orang	3 hari	22 JPL	1 Angk.
5. Pemandu Wisata Alam	30 orang	3 hari	22 JPL	1 Angk.
JUMLAH	150 orang			5 Angk.

Untuk mendukung kegiatan pada Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM di Balai Diklat LHK Makassar pada tahun 2020 diperlukan anggaran yang memadai. Pengalokasian anggaran tahun 2020 pada Balai Diklat LHK Makassar telah menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (ABK), sehingga setiap kegiatan jelas terukur sasaran yang ingin dicapainya.

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan diklat di Balai Diklat LHK Makassar tahun 2020 adalah **Rp. 19.475.000.000,-** (*sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2020 ini menyajikan arahan yang bersifat operasional dan merupakan dokumen rencana pelaksanaan penyelenggaraan diklat SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 di lingkup Balai Diklat LHK Makassar.

Agar penyelenggaraan kegiatan diklat SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar diharapkan semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam keseluruhan proses penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Selain itu, diharapkan pula adanya masukan-masukan dan saran-saran guna lebih mengembangkan program dan kegiatan penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan di masa datang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan penyelenggaraan diklat SDM lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 lebih terarah, efisien, efektif dan optimal dalam upaya mendukung pelaksanaan pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan.

V. LAMPIRAN

Lampiran 1.

MATRIK RENCANA DAN KEGIATAN TAHUN 2020
SATKER BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR

No.	Unit Kegiatan/Elemen Kegiatan/Indikator Elemen	Sasaran	Target	Satuan	Alokasi (Rupiah)	Lokasi (sd kabupaten)
	<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK</i>					
1	Jumlah SDM Aparatur dan non aparatur yang meningkat kapasitasnya	390	390	orang	2,377,000,000	Makassar
2	Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	1	1	unit	520,000,000	Pangkep
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	layanan	1,000,000,000	Makassar
4	Layanan Perkantoran	1	1	layanan	14,980,000,000	Makassar
	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan</i>					
5	Jumlah generasi muda lingkungan hidup yang meningkat kapasitasnya	120	120	orang	598,000,000	Makassar
	Jumlah				19,475,000,000	

Lampiran 2.

**RENCANA DIKLAT TAHUN 2020
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR**

No.	Jenis Diklat	Lama Diklat (hr)	Jumlah Jam (jpl)	Peserta (org)	Ket.
A.	Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur				
	<i>Diklat Teknis dan Fungsional</i>			390	
1	Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan	6 hari	54 JPL	30	
2	Alih Tingkat Polhut Terampil Ke Polhut Ahli	9 hari	50 JPL	30	
3	PUHH Kayu Hutan Negara	8 hari	70 JPL	30	
4	Resolusi Konflik Sumber Daya Alam	5 hari	50 JPL	30	
5	Penyusunan Rancangan Sumur Resapan	6 hari	66 JPL	30	
6	Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	6 hari	60 JPL	30	
7	Pengembangan Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	6 hari	40 JPL	30	
8	Pelatihan Program Pendampingan Perhutanan Sosial	4 hari	50 JPL	30	
9	SIG Berbasis Ponsel	5 hari	50 JPL	30	
10	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) Berkecenderungan Hukum	4 hari	40 JPL	30	
11	Teknik Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bagi Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 hari	52 JPL	30	
12	Pelatihan Budidaya Lebah Trigona SP	4 hari	45 JPL	30	
B.	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan			120	
1	Pelatihan Budidaya Di Bawah Tegakan	3 hari	22 JPL	30	
2	Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Aren	3 hari	22 JPL	30	
3	Pelatihan Pengukuran dan Pemetaan Partisipatif Areal Kerja PS	3 hari	22 JPL	30	
4	Pelatihan Teknik Agroforestry	3 hari	22 JPL	30	
	Jumlah			510	

Lampiran 3.

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR

SASARAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN					KET.	
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	5	6	7	8	9		
1.	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur sebanyak 390 orang.	Terselenggaranya Diklat Teknis dan Fungsional	Peserta Diklat Teknis dan Fungsional sebanyak 390 orang (13 angk.)	Diklat Teknis dan Fungsional untuk SDM Aparatur LHK	Masukan	: - Dana	Orang	1.860.000.000	
					Keluaran	: - SDM		9	
					Hasil	: Aparatur yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai dengan jabatannya		390	
	Terselenggaranya Pendukung Kediklatan	Kegiatan Perencanaan, Program dan Anggaran Diklat	- Pelaksanaan IKD - Renja 2021 - Penyusunan RKA-KL 2021 - POK 2020 - Peningkatan Kapasitas Pegawai - Pelaksanaan EPD		Masukan	: - Dana	Dokumen	517.000.000	
					Keluaran	: - SDM		3	
					Hasil	: Dokumen IKD, EPD, Renja, RKA-KL/DIPA, POK		5	
		Pengembangan Kerjasama Diklat	Kerjasama Diklat dengan instansi lain		Masukan	: - Dana	Unit Kerja		
					Keluaran	: - SDM		2	
					Hasil	: Dokumen Hasil Kerjasama Diklat		1	
2.	Terwujudnya KHDTK sebagai sarana pembelajaran diklat sebanyak 1 unit	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pada KHDTK Tabo-Tabo untuk mendukung fungsinya	Perencanaan KHDTK	- Rencana Pengelolaan KHDTK 2021	Masukan	: - Dana	Rp	520.000.000	
					Keluaran	: - SDM		Orang	
					Hasil	: Dokumen Rencana Pengelolaan KHDTK		Dokumen	
			Pemeliharaan KHDTK	- Pemeliharaan demplot-demplot, batas jalan, tracking - Sarana persuteraan alam - Sarana persemaian	Masukan	: - Dana	Rp		
					Keluaran	: - SDM		Orang	
					Hasil	: Pemeliharaan pada KHDTK Tabo-Tabo		Kegiatan	
			Perlindungan, Pengamanan dan Penyuluhan KHDTK	- Perlindungan dan Pengamanan - Penyuluhan	Masukan	: - Dana	Rp		
					Keluaran	: - SDM		Orang	
					Hasil	: Perlindungan dan pengamanan kawasan serta penyuluhan untuk KTH		Kegiatan	
					Masukan	: - Dana	Unit Kerja		
					Keluaran	: - SDM		Orang	
					Hasil	: Terciptanya kondisi aman terhadap KHDTK dan KTH yang berfungsi secara baik		Unit Kerja	

SASARAN KEGIATAN			OUTPUT KEGIATAN					KET.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Uraian	Indikator Kinerja		Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	5	6		7	8	9
		Administrasi dan Pelaporan KHDTK	- Administrasi dan pelaporan - Pelayanan Data dan Informasi - Tenaga Bakti Rimawan - Monev dan pelaporan	<i>Masukan</i>	:	- Dana - SDM	Rp Orang Berkas	1
				<i>Keluaran</i>	:	Laporan kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat	Unit Kerja	1
				<i>Hasil</i>	:	Tersedianya laporan kegiatan yang baik		
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 layanan	Terlaksananya layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan baik	Tersedianya sarana dan prasarana internal yang baik	Pengadaan sarana dan prasarana internal yang baik	<i>Masukan</i>	:	- Dana - SDM	Rp Orang Layanan
					<i>Keluaran</i>	:	Sarana dan prasarana internal yang efektif dan efisien	1
					<i>Hasil</i>	:	Tersedianya sarana dan prasarana internal	Unit Kerja 1
4.	Layanan Perkantoran 1 layanan	Terlaksananya layanan perkantoran dengan baik	Gaji dan Tunjangan 1 layanan	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 1 layanan	<i>Masukan</i>	:	- Dana - SDM	Rp Orang Bulan
					<i>Keluaran</i>	:	Gaji dan tunjangan pegawai yang dibayarkan sesuai dengan peruntukannya	12
					<i>Hasil</i>	:	Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal	Unit Kerja 1
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor selama 12 bulan	Pembayaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor selama 12 bulan	<i>Masukan</i>	:	- Dana - SDM	Rp Orang Bulan
					<i>Keluaran</i>	:	Operasional dan kegiatan pemeliharaan perkantoran terbayarkan	12
					<i>Hasil</i>	:	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran secara teratur dan optimal	Unit Kerja 1
5.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan sebanyak 120 orang.	Terselenggaranya Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan	Peserta Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan sebanyak 120 orang (4 angk.)	Diklat Pelatihan Masyarakat Bidang Kehutanan	<i>Masukan</i>	:	- Dana - SDM	598.000.000 12
					<i>Keluaran</i>	:	Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan bidang kehutanan sesuai dengan kebutuhannya	Orang 120
					<i>Hasil</i>	:	Meningkatnya kapasitas masyarakat di bidang pelatihan kehutanan	Orang 120